

## HUBUNGAN TINGKAT KEMISKINAN DENGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP PADA KAWASAN MINAPOLITAN

### *POVERTY RELATIONSHIP WITH THE UTILIZATION OF CAPTURE FISHERIES RESOURCES IN THE MINAPOLITAN AREA*

**Jamilah\*, Mawardati**

Program Studi Agribisnis, Universitas Malikussaleh

\*Penulis korespondensi: [jamilah@unimal.ac.id](mailto:jamilah@unimal.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*The high poverty rate of coastal communities shows that the potential of East Aceh Regency fisheries resources cannot be maximally utilized. For this reason, the government has planned the development of the east coast of Aceh Province through the Minapolitan Program. The study aims to analyze the relationship of poverty levels of fishermen with the utilization of capture fisheries resources in the Minapolitan Region. The method used is a survey method with an explanatory approach to explanatory research. Determination of districts is done purposively, namely East Aceh Regency as a minapolitan area of capture fisheries based on the decision of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 35 / KEPMEN-KP / 2013. The results of the study show that East Aceh Regency has considerable fisheries potential as a regional economic driving force and can be developed in an integrated manner in the Minapolitan area, but the level of utilization of capture fisheries resources has not been maximized, only 27,659.5 tons or 10.16% of the total sustainable potential of Aceh Province. It is estimated that 10,053 fishermen or 76.07% of fishermen do not have capture fleets. Fish production is 27,474.3 tons / year and the average production of fishermen is 6.67 kg / day. The contribution of fishermen's income in meeting household needs is Rp. 13,340 / capita / day or Rp. 346,840 / capita / month. Fishermen's income is below the poverty line and falls into the poorest category.*

*Keywords: Poverty, fishermen, utilization, resources.*

#### **ABSTRAK**

Tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa potensi sumberdaya perikanan Kabupaten Aceh Timur belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pemerintah mencanangkan pengembangan wilayah pesisir timur Provinsi Aceh melalui Program Minapolitan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat kemiskinan nelayan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap pada Kawasan Minapolitan. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan *explanatory explanatory research*. Penentuan kabupaten dilakukan secara *purposive*, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah dan dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam kawasan minapolitan, namun tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum maksimal,

hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Propinsi Aceh. Diperkirakan sebanyak 10.053 nelayan atau 76,07 % nelayan tidak memiliki armada tangkap. Produksi ikan sebanyak 27.474,3 ton/tahun dan rata-rata produksi ikan di tingkat nelayan sebesar 6,67 kg/hari. Kontribusi pendapatan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebesar Rp 13.340/kapita/hari atau Rp. 346.840/kapita/bulan. Pendapatan nelayan dibawah garis kemiskinan dan tergolong dalam kategori paling miskin.

**Kata kunci:** Kemiskinan, nelayan, pemanfaatan, sumberdaya.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan isu utama pembangunan ekonomi Aceh. Namun kemiskinan nelayan Aceh yang mencerminkan kondisi keprihatinan rumah tangga, permasalahan, keterbatasan sumberdaya nelayan dan harapan nelayan Aceh masih belum digambarkan secara nyata, bahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan nelayan yang menjratnya dalam jurang kemiskinan.

Kabupaten Aceh Timur memiliki panjang pantai 161 km dan 14 kecamatan pesisir merupakan potensi perikanan yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah bila hal itu dapat dikembangkan secara terintegrasi dalam kawasan minapolitan. Terdapat 250.833 jiwa penduduk yang tersebar pada 14 kecamatan pesisir atau 71,79 % dari penduduk Aceh Timur dan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan atau petambak. Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya.

Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap merupakan kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (KKP, 2011). Program minapolitan perikanan tangkap salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap.

Perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan, infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Namun demikian sumberdaya ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Aceh Timur sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta) tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 61.630 jiwa atau sebesar 15,06 persen dan sebagian besar berada di wilayah pesisir dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.186/kapita/bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017). Besarnya angka kemiskinan di wilayah pesisir mengindikasikan bahwa akses-akses

masyarakat pesisir (nelayan) dalam melakukan usaha-usaha peningkatan taraf hidup memiliki keterbatasan. Ketidakpastian pendapatan dan kurangnya akses nelayan dalam memperoleh modal usaha memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Di Kabupaten Aceh Timur, sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didukung oleh Sugiharto *et al.* (2013) menyatakan bahwa perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi dan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Program Minapolitan secara bertahap ditujukan untuk pengembangan perikanan, pemberdayaan nelayan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, adil dan merata.

## METODE PENELITIAN

Penentuan kabupaten dilakukan secara *purposive*, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013.

Responden yang dijadikan sampel penelitian adalah nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur, yang dikategorikan kepada 3 kelompok nelayan, yaitu : (1) nelayan yang menggunakan perahu mesin, (2) nelayan yang menggunakan perahu tanpa mesin, dan (3) anak buah kapal (ABK). Metode pengambilan sampel nelayan dilakukan dengan metode *simple random sampling* yakni pengambilan secara acak sederhana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory research* dengan metode survei (*Survey Method*). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.

Analisis tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap nelayan dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan nelayan dilakukan untuk mengetahui tingkat optimal kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi perikanan tangkap dengan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan nelayan dicirikan oleh pendapatan yang berfluktuasi, pengeluaran yang konsumtif, pendidikan rendah, dan potensi tenaga kerja keluarga (istri dan anak) belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemiskinan nelayan lebih dekat kepada bentuk kemiskinan struktural daripada bentuk kemiskinan fisik (absolute). Indikator kemiskinan rumah tangga nelayan yang digunakan adalah : (1) penguasaan asset produksi nelayan, yakni berdasarkan pemilikan alat tangkap, (2) pola pengeluaran rumah tangga, baik pangan maupun non pangan, (3) sumber pendapatan rumah tangga nelayan dari hasil tangkapan ikan atau usaha perikanan sekitar 60 persen dan usaha non perikanan berkisar 23 persen, dan (4) aktivitas perikanan dan non perikanan (Indraningsih dan Noekman, 1995).

Rumah tangga nelayan menghadapi persoalan kompleks dalam hubungannya dengan produksi, konsumsi, dan alokasi tenaga kerja. Hal ini menyebabkan analisis satu sisi untuk melihat tingkah laku ekonomi nelayan sangatlah lemah (Fauzi dan Anna, 2002). Permasalahan di wilayah pesisir antara lain : (1) pemanfaatan sumberdaya melebihi kapasitas dan daya dukung, (2) kompetisi antara skala industri, (3) distribusi hasil tidak seimbang dan adil karena akses terhadap usaha perikanan yang berbeda, (4) kebijakan secara spasial untuk daerah pesisir pantai dan pulau kecil sehingga mengakibatkan banyak area yang rusak, (5) kelebihan investasi pada beberapa sektor, sementara investasi sektor yang lain terbatas, dan (6) kemiskinan struktural terutama di desa pesisir/desa nelayan (Muhammad, 2002).

Potensi sumber daya perikanan yang besar terindikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Aceh yang tercermin dari lingkungan perumahan yang tidak sehat, terbatasnya fasilitas kesehatan dan minimnya sarana pendidikan. Kondisi ini menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi wilayah. Skala ekonomi perikanan yang berkembang di Kabupaten Aceh Timur adalah skala ekonomi tradisional atau skala kecil. Industri perikanan ini dicirikan oleh penggunaan alat yang sederhana seperti kapal tanpa motor, alat tangkap yang sederhana, dan jarak tangkap yang terbatas sekitar perairan Selat Malaka saja paling jauh penangkapan pada ZEE. Memang ada beberapa kapal yang berlayar sampai ke Laut Andaman. Dari 1.314 unit armada yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap, 687 unit berupa armada kapal motor kurang dari 5 GT (*gross tonase*) atau 52,2 % (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017). Akibatnya ruang gerak nelayan menjadi terbatas karena tidak mampu beroperasi lebih sehingga konsentrasi daerah penangkapan (*fishing ground*) berada di perairan kurang dari 4 mil laut. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dalam penguasaan penangkapan ikan yaitu jangkauan wilayah perairan pantai dan laut yang dapat ditempuh, intensitas pemakaian modal kerja, perbaikan dan stabilitas harga ikan serta penyebaran informasi pasar (Muhammad, 2002).

Potret kemiskinan nelayan mencerminkan keterbatasan nelayan, baik dalam penangkapan ikan, media tangkap, dan peluang pemanfaatan sumberdaya perikanan. Sumber utama pendapatan rumahtangga nelayan adalah hasil penjualan ikan yang sangat tergantung kepada musim dan besarnya hasil tangkapan. Aktifitas nelayan sebagian besar pada usaha penangkapan ikan seperti perbaikan alat tangkap (jaring), pengolahan ikan, pengangkutan, dan pemasaran ikan. Aktifitas lain yang mungkin dilakukan adalah berdagang dan kegiatan di luar pertanian. Namun sebagian besar nelayan hanya mengandalkan hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan.

Rendahnya pendapatan nelayan karena hasil tangkapan ditentukan oleh perubahan angin dan sistim bagi hasil. Keterikatannya dengan pemilik kapal menyebabkan nelayan terlibat hutang dan terjerat kemiskinan (Jamilah, 2015). Jika usaha penangkapan ikan menggunakan kapal (dilakukan oleh nelayan sebanyak 20 orang hingga 25 orang) dengan lama penangkapan 3 hari (3 x 24 jam), maka pendapatan nelayan ditentukan oleh sistim bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal. Sistem bagi hasil merupakan salah satu aspek kelembagaan dalam produksi berupa perjanjian pembagian hasil tangkapan ikan yang berlaku antara nelayan dengan pemilik kapal/perahu beserta perjanjian lainnya yang mengikat.

Tabel 1 Sistem Bagi Hasil pada Usaha Penangkapan Ikan

No.	Distribusi Pekerjaan	Jumlah Pekerja (Orang)	Pembagian Hasil (Bagian)
1.	Pawang	1	5,0
2.	Wakil Pawang	1	4,0
3.	Tukang Lampu	2	3,0
4.	Masnage	1	2,5
5.	Anak Buah Kapal (ABK)	15	1,0
Jumlah		20	15,5

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Ikan hasil tangkapan dijual oleh touke bangku. Touke bangku merupakan pemilik modal atau orang yang ditugaskan oleh pemilik modal untuk mengelola kapal. Jika touke bangku bukan pemilik kapal maka biaya operasional dalam penangkapan ikan ditanggung oleh touke bangku sedangkan pemilik modal hanya menyediakan kapal dan sarana penangkapan ikan. Hasil penjualan ikan yang diperoleh dikurangi dengan biaya bahan bakar solar 100 lt seharga Rp. 6.500/lt sebesar Rp. 650.000. Makanan selama 5 hari untuk 20 orang sebesar Rp. 1.000.000, penggunaan es sebanyak 50 bak (1 bak @ Rp. 25.000/bak) sebesar Rp. 1.250.000. Biaya bahan bakar, makanan dan es ditanggung oleh touke sedangkan rokok ditanggung oleh nelayan. Setelah dikurangi biaya bahan bakar selanjutnya dipotong 10% dari hasil penjualan ikan untuk pemilik modal, dan sisanya dibagi sebesar 40% untuk touke bangku dan 60% untuk nelayan yang ikut melaut. Bagian 60% untuk nelayan dibagi kepada 20 orang nelayan yang ikut melaut. Pembagian hasil diantara nelayan tersebut dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing di kapal saat melaut sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1. Anak buah kapal (15 orang) hanya memperoleh 1/15 bagian dari 1 bagian (dari bagian 60% setelah dikurangi bagian 40% untuk touke bangku). Dalam hal ini, pawang terkadang juga mendapat bonus tambahan dari touke bangku. Sistim pembagian hasil ini jelas sangat menguntungkan touke bangku atau pemilik modal. Penerimaan nelayan atau anak buah kapal tak sebanding dengan waktu yang digunakan untuk melaut dan bersifat fluktuatif tergantung banyaknya ikan tangkapan dan harga jual ikan.

Pada musim panen ikan antara bulan Desember hingga bulan Maret, jumlah tangkapan ikan per hari sebanyak 2 ton ikan. Rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan kapal berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan nelayan hanya melaut 5 hari dalam seminggu. Jika pendapatan rata-rata nelayan dikonversi dalam seminggu adalah minimal Rp. 35.714,29/hari, hingga Rp. 71.428,57/hari. Jika diasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang, maka pendapatan minimum Rp. 7.142,86 per kapita per hari dan maksimum Rp. 14.285,71 per kapita per hari atau Rp. 428.571,30 per kapita per bulan. Pendapatan nelayan dibawah garis kemiskinan dan tergolong dalam kategori paling miskin. Garis kemiskinan di Propinsi Aceh pada tahun 2018 adalah Rp 454 740/kapita/bulan (BPS, 2018)

Aktivitas pengolahan (*processing*) atau agroindustri perikanan seperti pembekuan, pemindangan, penggaraman dan sebagainya serta pengemasan (*packaging*) masih sangat minim dilakukan di Kabupaten Aceh Timur. Sebagian besar ikan dijual dalam bentuk segar keluar wilayah kabupaten tanpa diolah di tempat, bahkan diekspor ke Malaysia sehingga upaya penciptaan nilai tambah dari sub sektor perikanan relatif minim. Hanya sebagian kecil yang dilakukan pengolahan berupa pembuatan ikan asin, ikan kayu, abon ikan, terasi/belacan, dan pembuatan pindang ikan presto, terutama pada saat terjadi penurunan harga jual ikan. Hingga saat ini, aktivitas pengolahan masih pada tingkat agroindustri rumah tangga dan tradisional, belum ada unit pengolahan modern atau investasi skala perusahaan. Di sisi lain, Kabupaten Aceh Timur memiliki peluang ekspor komoditi perikanan ke negara Uni Eropa langsung dari pelabuhan karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi telah mendapat sertifikat dari Uni Eropa.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilakukan melalui: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat (Nikijuluw, 2001). Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Aceh Timur berdampak positif bagi perikanan tangkap diantaranya peningkatan infrastruktur kawasan minapolitan, peningkatan produksi perikanan tangkap, penyerapan tenaga kerja, penambahan sarana dan prasarana perikanan tangkap, peningkatan usaha perikanan tangkap, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM), dan peningkatan permodalan & investasi (Jamilah dan Mawardati, 2017a). Dalam pelaksanaannya, program minapolitan mengalami berbagai permasalahan, diantaranya pola pengusahaan masih tradisional, minimnya investasi dan tenaga ahli di bidang pengolahan ikan akibatnya ikan banyak dipasarkan dalam bentuk segar, kurangnya sinergitas stakeholder lintas sektor dalam proses pembangunan, keterbatasan dana sehingga masih minimnya penyuluhan dan pelatihan, akibatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada kawasan minapolitan belum menunjukkan peningkatan yang berarti (Jamilah dan Mawardati, 2017b).

### **Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pemanfaatan sumberdaya Ikan**

Sumberdaya perikanan mencakup sumberdaya perikanan budidaya dan sumberdaya perikanan laut. Perikanan budidaya merupakan suatu usaha memanfaatkan sumberdaya di kawasan pesisir dalam hal memelihara berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, rumput laut dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis penting (Triarso, 2004). Potensi ikan lestarinya paling tidak ada sekitar 6,17 juta ton per tahun, terdiri atas 4,07 juta ton di perairan nusantara yang hanya 38 persennya dimanfaatkan dan 2,1 juta ton per tahun berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Potensi ini pemanfaatannya juga baru 20 persen (Dahuri, 2002). Sustainability perikanan tangkap terancam oleh overfishing yang ditandai dengan hasil tangkapan ikan yang cenderung menurun dan ukuran ikan hasil tangkapan yang semakin kecil dari tahun ke tahun (Triarso, 2012).

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap mencakup besarnya partisipatif nelayan pada usaha penangkapan ikan, pengolahan, dan pemasaran ikan dan kemampuan perikanan tangkap dalam menunjang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Hal ini sebagaimana diselaraskan pada Program Minapolitan yang dicanangkan pemerintah. Nelayan merupakan tenaga kerja aktif yang memperoleh sumber penghidupannya dari aktifitas penangkapan ikan di laut, dan tidak menutup kemungkinan memperoleh sumber kehidupan dari lainnya.

Pemanfaatan potensi laut dan perikanan tangkap diukur berdasarkan kapasitas penangkapan. Menurut Wiyono (2005), Kapasitas penangkapan (*fishing capacity*) diartikan sebagai kemampuan input perikanan (unit kapal) yang digunakan dalam memproduksi output (hasil tangkapan), yang diukur dengan unit penangkapan atau produksi alat tangkap lain. Kemampuan ini bergantung pada volume stok sumberdaya ikan yang ditangkap (baik musiman maupun tahunan) dan kemampuan alat tangkap itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, *overcapacity* diterjemahkan sebagai situasi dimana berlebihnya kapasitas input perikanan (armada penangkapan ikan) yang digunakan untuk menghasilkan output perikanan (hasil tangkapan ikan) pada level tertentu. *Overcapacity* yang berlangsung terus menerus pada akhirnya akan menyebabkan overfishing, yaitu kondisi dimana output perikanan (hasil tangkapan ikan) melebihi batas maksimumnya. Diantara seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, subsektor perikanan Kabupaten Aceh Timur yang paling tinggi aktifitas upaya penangkapannya. Pada tahun 2014, produksi perikanan laut dan umum didominasi Kabupaten Aceh Timur lebih tinggi (16.018.9 ton) dibanding kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Aceh, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan produksi, mencapai 10.027.4 ton, dengan peringkat ke-empat setelah Kabupaten Aceh Selatan (18.479.4 ton), Bireuen (16.494.3 ton), dan Langsa (14.195.3 ton) (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016). Potensi perikanan tangkap Provinsi Aceh mencapai 272,2 ribu ton/tahun. Pada tahun 2016, tingkat pemanfaatan perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Provinsi Aceh.

Tabel 2 Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014-2016

No	Perikanan Laut	Produksi (Ton)			Nilai Produksi (Rp. 000)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Ikan	21.805,7	20.031,3	27.474,3	420.940.189,0	392.012.679,3	599.565.982,3
2	Udang	123,6	181,4	173,1	5.573.940,0	6.892.555	8.837.325
3	Binatang berkulit keras	19,01	41,9	12,1	381.480,0	837.754	277.288
4	Binatang berkulit lunak	50,2	57,4	0	1.255.875,0	1.435.225	0
Jumlah					428.151.484,0	401.178.213,3	608.680.595,3

Sumber: Aceh Timur Dalam Angka, 2017.

Produksi dan nilai produksi perikanan laut Kabupaten Aceh Timur antara tahun 2014-2016 berfluktuasi (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil perikanan laut belum maksimal. Mengacu pada survei PT. Central Data Meditama Indonesia (CDMI) Consulting, dalam 6 tahun terakhir kondisi perikanan dalam negeri semakin membaik, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya produksi, baik produksi perikanan tangkap maupun budidaya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 20% per tahun. Tahun 2011 perkembangan produksi perikanan budidaya mencapai 6,47 juta ton ditahun 2016 angkanya telah mencapai 19,75 juta ton, sedangkan produksi perikanan tangkap ditahun 2011 mencapai 5,71 juta ton dan tahun 2016 angkanya telah mencapai 27,66 juta ton. Hingga akhir tahun 2016 nilai produksi perikanan Indonesia mencapai Rp. 608,68 milyar.

Produksi perikanan laut Kabupaten Aceh Timur terdiri dari ikan, udang, binatang berkulit keras, dan binatang berkulit dengan nilai produksi berkisar antara Rp 401.178.213,3 hingga Rp 608.680.595,3. Produksi ikan dominan sebanyak 16,389,481 ton dengan jenis ikan meliputi; layang deles, Tongkol como, cakalang, yellow fin, selar, tongkol krai, kembung dan lisong. Pada tahun 2016, produksi ikan sebesar 27.474,3 ton dengan rata-rata produksi ikan per

harinya mencapai 88,06 ton/hari. Jumlah nelayan sebanyak 13.212 orang, maka rata-rata produksi nelayan sebesar 6,67 kg/hari. Jika diasumsikan harga jual ikan rata-rata Rp. 10.000/kg (mengacu pada harga jual ikan tongkol per kilogram di tingkat nelayan), maka rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp. 66.700/hari. Jika diasumsikan jumlah anggota keluarga sebanyak 5 (lima) orang, maka pendapatan perkapita per hari sebesar Rp 13.340/kapita/hari atau Rp. 346.840/kapita/bulan. Pendapatan nelayan sebesar Rp. 346.840/kapita/bulan berada dibawah garis kemiskinan BPS tahun 2016 yaitu Rp. 415 826/kapita/bulan dan termasuk dalam katagori paling miskin.

Tabel 3 Produksi Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2015-2016

No.	Kecamatan	Produksi Perikanan Laut (Ton)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Birem Bayeun	34,01	44,46
2	Rantau Selamat	38,58	53,82
3	Sungai Raya	95,86	99,16
4	Peureulak	542,00	677,83
5	Peureulak Timur	19,03	34,03
6	Idi Rayeuk	16.874.282	23.738,11
7	Peudawa	170,76	187,18
8	Darul Aman	1.801,93	1.725,59
9	Nurussalam	133,56	158,62
10	Julok	470,51	528,99
11	Simpang Ulim	180,55	183,28
12	Madat	39,01	43,22
Kabupaten Aceh Timur		20.031,34	27.474,29

Sumber: Aceh Timur Dalam Angka, 2017.

Tabel 3 memperlihatkan adanya peningkatan produksi ikan yang cukup tinggi pada tahun 2016, mencapai 37,16% (27.474,29 ton) dibanding tahun 2015 (20.031,34 ton). Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi ekosistem berjalan dengan baik atau tingkat pemulihan dari jenis-jenis ikan tersebut masih berjalan baik. dan didukung oleh program pengembangan kawasan minapolitan yang digalakkan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Semakin baik fungsi ekosistem maka secara tidak langsung risiko/ancaman bagi keberlanjutan semakin kecil (Hartono et. al 2005).

Berdasarkan kecamatan, produksi perikanan laut Kecamatan Idi Rayeuk (Kawasan Minapolitan) mencapai 86,40% dari total produksi perikanan laut di Kabupaten Aceh Timur. Adapun produksi ikan dominan di Kecamatan Idi Rayeuk antara lain layang deles, tongkol como, cakalang, yellow fin, selar, tongkol krai, kembung, dan lisong. Hal ini didukung oleh infrastruktur berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan kelembagaan ekonomi perikanan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan kawasan minapolitan di daerah ini bertumpu pada perikanan tangkap. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Idi Rayeuk menyebabkan kehidupan nelayan terpusat pada seluruh kegiatan penangkapan ikan seperti pengadaan sarana penangkapan ikan (unit penyediaan BBM, pabrik es, dan alat penangkapan ikan), penangkapan ikan (yang membedakan nelayan berdasarkan kepemilikan alat tangkap), perbaikan jaring, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Data UPTD Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk menunjukkan bahwa sebagian besar produksi ikan dipasarkan dalam bentuk ikan segar di luar Kabupaten Aceh, mencapai 60% ikan



segar, selebihnya dipasarkan dalam wilayah kabupaten Aceh Timur (Tabel 4). Ikan yang dipasarkan ke Medan Propinsi Sumatera ditujukan untuk di ekspor ke Malaysia, mencapai 30% dari jumlah produksi ikan kabupaten Aceh Timur.

Tabel 4 Data Pemasaran Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk, Tahun 2015

No	Tujuan Pemasaran	Jumlah Ikan (Kg)	Persentase (%)
1	Lokal (dalam Kabupaten Aceh Timur)	6.749.713	40
2	Luar Kabupaten Aceh Timur	10.124.570	60
	Banda Aceh	337.486	2
	Lhoksukon	168.743	1
	Pantonlabu	168.743	1
	Langsa	168.743	1
	Kuala Simpang	168.743	1
	Takengon	506.228	3
	Sibolga	337.486	2
	Medan	5.062.285	30
	Padang	1.687.428	10
	Jambi	843.714	5
	Riau	674.971	4
	<b>Total</b>	<b>16.874.283</b>	<b>100</b>

Sumber: UPTD Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk, 2015

### Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Sarana Perikanan

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan dan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Pembangunan pelabuhan perikanan harus memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai, seperti cold storage, fasilitas pengisian bahan bakar dan ketersediaan listrik. Agar tidak terjadi eksploitasi berlebih yang dapat mengganggu ketersediaan sumber daya ikan, maka jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan harus ditentukan (Adam, 2012).

Pemanfaatan potensi laut dan perikanan tangkap di perairan Kabupaten Aceh Timur diperkirakan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun sarana prasarana seperti kapal dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 menetapkan bahwa kewenangan provinsi hanya mengelola wilayah laut dari 0-12 mil. Di wilayah inilah nelayan-nelayan bisa mengeksplorasi hasil laut. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. UU no. 45 tahun 2009, pengelolaan perikanan menyangkut berbagai tugas yang kompleks yang bertujuan untuk menjamin adanya hasil dari sumberdaya alam yang optimal bagi masyarakat setempat, daerah dan negara yang diperoleh dari memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan.

Jumlah armada tangkap pada tahun 2016 sebanyak 3.163 unit yang terdiri dari 554 unit perahu tanpa motor, 1.047 unit perahu motor tempel, dan 1.562 unit kapal motor (Tabel 5). Armada tangkap kapal motor yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Idi terdiri dari berbagai ukuran mulai dari < 5 GT hingga yang berukuran 90 GT. Jumlah nelayan berkisar 13.216 orang, maka diperkirakan sebanyak 10.053 nelayan atau 76,07 % nelayan tidak memiliki armada tangkap. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan merupakan ABK (anak buah kapal). Posisi nelayan dalam penangkapan ikan akan menentukan besarnya penerimaan nelayan.

Tabel 5 Jenis Armada Tangkap di Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014-2017

Jenis Armada Tangkap	Tahun		
	2014	2015	2016
Perahu tanpa motor	554	554	554
Perahu motor temple	885	713	1.047
Kapal motor	1.481	1.486	1.562
Jumlah	2.700	2.753	3.163

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017.

Sifat kepemilikan sarana penangkapan berhubungan dengan penerimaan keuntungan dari usaha perikanan. Kepemilikan sarana penangkapan ada yang dimiliki pemilik lokal, campuran antara pemilik lokal dan non lokal maupun pemilik non lokal yang menanamkan modalnya di usaha perikanan pada suatu wilayah. Sifat kepemilikan sarana penangkapan ini selain menunjukkan penerimaan keuntungan juga menunjukkan tingkat kemandirian masyarakat pesisir terhadap kepemilikan aset usaha perikanan yang tidak tergantung pada pihak luar. Jika keuntungan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat pesisir maka kecenderungan masyarakat pesisir akan lebih mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap (risiko/ancaman terhadap kelestarian sumberdaya perikanan tangkap akan semakin kecil) (Hartono et al., 2005).

Tabel 6 Data Perkembangan Alat Tangkap di Pelabuhan Perikanan Idi Tahun 2015

No.	Jenis Alat Tangkap	Jumlah alat tangkap ( unit)	
		2014	2015
1	Jaring insang (Gill Net)	62	65
2	Pancing	52	65
3	Mini Purse seine	75	75
4	Purse seine	150	160
TOTAL		334	365

Sumber: UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk, 2015.

Data mengenai perkembangan jumlah alat tangkap berjalan seiring dengan penambahan armada tangkap. Tabel 6 menunjukkan bahwa jenis alat tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Idi sebagian besar berupa pancing dan purse seine. Perkembangan jumlah alat tangkap sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 6. Kapasitas penangkapan mencerminkan besarnya pemanfaatan perikanan. Kapasitas penangkapan ditentukan oleh ketersediaan armada dan alat tangkap serta infrastruktur perikanan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik antar stakeholder untuk membangun kawasan minapolitan dari berbagai aspek pengembangan perikanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryawati dan Purnomo (2011) menunjukkan bahwa aspek ekologi, ekonomi, teknologi, dan infrastruktur kurang berkelanjutan, aspek sosial budaya cukup berlanjut, aspek politik, hukum dan kelembagaan sangat berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara para stakeholder yang terlibat belum maksimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap Kabupaten Aceh Timur belum maksimal, hanya 27.659,5 ton atau 10,16% dari total potensi lestari Propinsi Aceh. Produksi ikan sebanyak 27.474,3 ton/tahun dan rata-rata produksi ikan di tingkat nelayan sebesar 6,67 kg/hari. Kontribusi pendapatan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sebesar Rp 13.340/kapita/hari atau Rp. 346.840/kapita/bulan. Pendapatan nelayan dibawah garis kemiskinan dan tergolong dalam kategori paling miskin.
2. Kapasitas penangkapan ditentukan oleh ketersediaan armada dan alat tangkap serta infrastruktur perikanan. Diperkirakan sebanyak 10.053 nelayan atau 76,07 % nelayan tidak memiliki armada tangkap. Penambahan armada tangkap melalui program minapolitan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mengurangi ketergantungan dengan pemilik modal.

### Saran

1. Program minapolitan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pengembangan infrastruktur dan industri perikanan, pemberian bantuan sarana penangkapan ikan, kemudahan akses kredit bagi nelayan, dan pemberdayaan nelayan (pendidikan dan keterampilan pengolahan ikan, menggerakkan partisipasi wanita nelayan, perbengkelan nelayan) dalam rangka menanggulangi kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Aceh.
2. Integrasi secara sinergik antara pemerintah daerah, swasta, perbankan, lembaga swadaya lokal dan asing akan menjadi pilar utama pengembangan agroindustri perikanan di Kabupaten Aceh Timur sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, mengurangi angka kemiskinan masyarakat pesisir, menciptakan nilai tambah produk, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi gejolak sosial dalam masyarakat, dan meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 2(2):115-126.
- [BPS] Badan Pusat Statistik 2018. *Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2013 – 2018*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016. *Aceh Dalam Angka, 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017. *Aceh Timur Dalam Angka, 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Langsa.
- Dahuri, R. 2002. *Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Indonesia*. PKSPL. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Laporan Tahunan Program Minapolitan*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- Fauzi, A., and S. Anna. 2002. *Assessment of fishery resource depreciation for policy considerations*. *Journal of Coastal and Marine Resources* 4(2):36–49.

- Hartono, et al. 2005. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Perikanan*. 6(1): 65-76.
- Indrianingsih, S.K dan K.M. Noekman. 1995. Identifikasi Penduduk Miskin Di Jawa Timur. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian Kemiskinan di Pedesaan. *Pusat Penelitian Agro Ekonomi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Jamilah. 2015. Analisis Ketidakpastian Pendapatan Nelayan Aceh. *Jurnal E-Mabis*. 16(1): 120-127.
- Jamilah dan Mawardati. 2017a. Program Minapolitan dan Peranannya Dalam Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*. 16(1): 162-170.
- Jamilah and Mawardati. 2017b. *Opportunity and Constraints of Development of Fishery Minapolitan Regency of East Aceh District. The Prosiding of Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies (MICoMS). Institute of Research and Community Service. Malikussaleh University. Lhokseumawe – Aceh.*
- [KKP]. 2011. *Pedoman Umum Minapolitan*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Muhammad, S. 2002. Ekonomi Rumah Tangga Nelayan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Di Jawa Timur: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Sugiharto E, Salmani, Gunawan BI. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam: *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*. 3(2): 87-94.
- Suryawati SH dan AH Purnomo. 2011. Analisis ex-ante Keberlanjutan Program Minapolitan. *J. Sosek KP*. 6(1): 61-81.
- Triarso, I. 2004. *Study on Total Allowable Catch Determination. Coastal Community Developmnet and Fisheries Resources Management Project Central Java. Direktorat General of Capture Fisheries, Ministry Affairs and Fisheries, Jakarta.*
- Triarso, I. 2012. Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Saintek Perikanan*. 8(1): 186-197.
- UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk, 2016. *Laporan Tahunan 2015*. Pelabuhan Perikanan Nusantara. Idi Rayeuk.
- Wiyono ES. 2005. *Perspektif Baru dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan*. Edisi Vol. 3/XVII/Maret 2005 – Nasional.[terhubung berkala]. [http.io.ppi-jepang.org/article.php](http://io.ppi-jepang.org/article.php).